

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan di berbagai belahan dunia saat ini tidak hanya dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang begitu cepat, tetapi perusahaan juga dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekitarnya dan etika yang ada, dengan tujuan agar dapat tetap bertahan dengan pesaing lainnya di dalam bisnis yang sejenis (Farah & Candra, 2014).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang membuat perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*Corporate value*), yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (*financial*) saja. Tapi juga bertanggung jawab dan berpijak pada *triple bottom lines* yaitu memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Achmad Badjuri, 2011).

CSR banyak diperbincangkan pada beberapa tahun ini. Perusahaan banyak yang mulai menjalankan CSR ini dengan beberapa alasan, diantaranya adalah untuk menarik investor dan keunggulan bersaing, hal ini akan membuat dampak positif bagi perusahaan karena dapat membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan dan dapat menjamin kelangsungan perusahaan. Yang menerapkan CSR tidak hanya pada perusahaan di luar negeri, di Indonesia pun sudah banyak

perusahaan yang menerapkan pengungkapan CSR. Pada pelaporan tahunan walaupun masih dalam bentuk yang sederhana, tetapi berbagai aspek pertanggungjawaban sosial telah disebutkan didalam perusahaan. Umumnya perusahaan memilih bentuk pengungkapannya yaitu yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaannya. Perusahaan menyadari betapa pentingnya CSR untuk diungkapkan walaupun pengungkapan dalam laporan tahunananya masih belum terlalu lengkap dan rinci.

Dari beberapa industri yang ada, salah satunya adalah industri atau perusahaan pertambangan, industri pertambangan memiliki CSR yang berbeda dibandingkan dengan industri lain seperti industri perbankan, telekomunikasi, perkebunan dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan CSR pertambangan harus sesuai dengan Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (AMDAL) masing-masing perusahaan tambang yang telah disetujui oleh pemerintah ([www.neraca.id](http://www.neraca.id)).

CSR pada industri pertambangan sudah berkembang sejak tahun 1990. Tren ini mulai ada dan berkembang dengan pesat dikarenakan adanya tuntutan dari pihak eksternal, baik nasional maupun internasional. Dengan tujuan agar indutri pertambangan dapat berbisnis dengan lebih memperhatikan dampak-dampaknya terutama dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan (Sharma and Bhatnagar, 2014). Selain itu perusahaan pertambangan dikenal sebagai perusahaan pencemar lingkungan, maka dari itu perusahaan tambang diharuskan untuk menerapkan program CSR yang bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan ([www.neraca.id](http://www.neraca.id)).

Jika dilihat berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan, perusahaan di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam 9 jenis industri oleh BEI. Berdasarkan DISPERINDAG, dari ke Sembilan jenis industri yang tercatat, ada dua industri yang dinyatakan sebagai dua jenis industri yang memiliki kontribusi pembuangan limbah terbesar, industri pertambangan merupakan salah satu dari dua perusahaan tersebut dan yang kedua adalah industri manufaktur. Kedua perusahaan ini juga memiliki jumlah limbah yang besar (Farah Margaretha, 2014).

Pada dasarnya, pertambangan merupakan salah satu industri yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Sehingga keberadaannya di negeri ini memberikan dampak yang cukup besar. Pada tahun 2011 kontribusi sektor pertambangan dan penggalan mencapai 7,7% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Tetapi di Indonesia, kegiatan pertambangan dalam mengambil bahan galian berharga yang ada di lapisan bumi ini sudah berlangsung cukup lama, dan hal ini menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar ([www.neraca.id](http://www.neraca.id)).

Fenomena gencarnya isu LSM lingkungan yang kerap mengidentikan pertambangan dengan kehancuran lingkungan, hal ini menggambarkan jika sebuah perusahaan di bidang tambang merupakan perusahaan yang sensitif dan berdampak besar pada lingkungan. Jaringan Advokasi Tambanga (Jatam) memperkirakan, sekitar 70% kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97% juta hektar kawasan lindung terancam karena aktivitas pertambangan, termasuk keragaman hayati yang ada disana. Maka dari itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite meminta kepada setiap perusahaan tambang untuk menerapkan program CSR berupa

program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan ([www.neraca.com](http://www.neraca.com)).

Perusahaan pertambangan menerapkan CSR karena untuk mengimplementasikan prinsip tanggung jawab sosial seperti yang dikembangkan oleh *Global Reporting Initiative* (GRI). Selain untuk mengimplementasikan tersebut, perusahaan pertambangan juga mengadopsi sejumlah Standar Internasional dalam pelaksanaan CSR seperti ISO seri 14000 tentang manajemen lingkungan, ISO 26000 tentang manajemen CSR, standar CSR khusus dari SA8000, serta standar pengembangan masyarakat untuk industri pertambangan yang dikembangkan oleh *International Council on Mining and Metal* (ICMM) (Dede Abdul, 2016).

Perusahaan pertambangan yang menerapkan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial (CSR) PT Atlas Resources, perusahaan tambang batu bara ini menerapkan dan mengungkapkan CSR dan memasukkan program ini ke dalam visi misinya. PT Atlas memiliki visi Kemandirian Masyarakat Lokal Berbasis Kewirausahaan, pelaksanaan perusahaan ini berfokus pada 2 pilar yaitu pendidikan dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu misi dari PT Atlas ini yaitu memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang perusahaan. Selain itu perusahaan juga melaksanakan program CSR di bidang lainnya seperti di bidang kesehatan dan juga penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dengan mempekerjakan tenaga kerja lokal di lokasi tambang perusahaan ([www.atlas-coal.co.id](http://www.atlas-coal.co.id)).

Perusahaan pertambangan batu bara di daerah Merapi Area melakukan program CSR, yaitu dengan mendatangi kerjasama donasi untuk BPJS dengan Bupati Lahat . Ada 21 perusahaan tambang batu bara yang melaksanakan kerja sama ini. Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung kerjasama perusahaan pertambangan energi tentang donasi Bantuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Dari 21 perusahaan, salah satunya ada PT Bukit Asam Tbk yang juga ikut menandatangani kerjasama ini ([www.policewatch.news](http://www.policewatch.news)). PT Bukit Asam Tbk ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan terbaik yang ada di Indonesia, PT Bukit Asam Tbk selalu mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya di laporan tahunannya dan bahkan selalu mengungkapkan CSR ini dengan bentuk laporan keberlanjutan. Selain itu perusahaan ini mendapat apresiasi sebagai perusahaan tambang dengan kinerja terbaik, apresiasi ini diberikan oleh *Indonesia Mining Association* (AMI atau API) yang telah menggelar IMA Award 2018 ([kontan.co.id](http://kontan.co.id)).

CSR memiliki pengaturan dalam UU PT namun hanya terdapat dalam satu pasal yaitu pada pasal 74. Pasal 74 ini menegaskan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang mana kewajiban tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Adapula secara spesifik, pengaturan CSR dibidang industri pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomer 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pada pasal 108 UU Minerba

dinyatakan “pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, penyusunan program tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Praktik pengungkapan CSR di Indonesia diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 1 Revisi 2009 paragraf 9 yang menyatakan bahwa :

*“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement). Khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.*

CSR sangat dibutuhkan pada setiap perusahaan dengan tujuan agar perusahaan dapat meminimalisir dampak buruk terhadap aspek sosial dan lingkungan yang ditimbulkan selama menjalankan seluruh kegiatan yang ada. CSR ini bentuk pertanggungjawabannya bukan hanya dibuat untuk para pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan atau pihak lain yang bersangkutan dengan perusahaan. Dengan adanya kesadaran tentang dampak dari aktivitas perusahaan telah menyadari jika kerusakan lingkungan yang terjadi dapat dikurangi agar dapat dimanfaatkan untuk masa depan atau untuk generasi dimasa yang akan datang (Ni Wayan & Ni Putu, 2014).

Pelaporan keuangan merupakan media pengungkapan tanggung jawab perusahaan, selain itu perkembangan CSR mendorong perusahaan untuk mengungkapkan sebuah laporan yang tidak hanya fokus pada kondisi keuangan

perusahaan saja, tetapi juga menyediakan informasi lingkungan dan sosial yang disebut dengan laporan keberlanjutan atau *sustainability report*. *Sustainability report* ini disusun berdasarkan pedoman dari *Global Reporting Initiative (GRI)* yang disusun terpisah dari laporan keuangan atau laporan tahunan (Dita Rohmah, 2015). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan konsekuensi logis dari implementasi *Good Corporate Governance (GCG)*, yang memiliki prinsip yaitu yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang baik untuk menjaga kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Mekanisme akan berjalan dengan baik dan dilandasi dengan prinsip *Corporate Governance* seperti pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan karyawan, dan direksi dilaksanakan (Dita Rohmah, 2015). Maka dari itu pada penelitian ini akan dilihat penerapan GCG akan dilihat mekanismenya dan apakah faktor ini mempengaruhi CSR seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris, kepemilikan manajerial. Selain itu peneliti akan melakukan penelitian pengaruh dari ukuran perusahaan dengan menggunakan indikator pengukuran total aset perusahaan. Faktor lain yang akan diteliti pada pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah faktor fundamental perusahaan, dimana faktor ini akan diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio *leverage* dan rasio profitabilitas.

Ukuran perusahaan merupakan sebuah skala yang dapat digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Pada umumnya perusahaan yang memiliki skala yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan informasi

tentang tanggung jawab sosial (CSR) dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki skala kecil (Rizkia Anggita, 2012). Kepemilikan institusional merupakan salah satu dari struktur kepemilikan, dan pada umumnya variabel ini dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Raisa Pratiwi, 2012). Maka dari itu tingkat kepemilikan institusional yang semakin tinggi akan meningkatkan tingkat pengawasan terhadap manajemen. Dan pengungkapan CSR merupakan salah satu aktivitas yang dimonitor oleh pemilik saham institusi (Achmad Badjuri, 2011).

Ukuran Dewan Komisaris dapat memonitor dan mengendalikan CEO. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris (DK), maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan *monitoring* yang dilakukan akan semakin efektif (Maria Wijaya, 2012). Sehingga dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk dapat mengungkapkan informasi tanggung jawab sosialnya (CSR) melalui wewenang yang dimiliki. Dan umumnya perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak untuk mengungkapkan informasi CSR nya. Kepemilikan Manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Manajemen umumnya akan lebih termotivasi untuk melakukan pengelolaan perusahaan, karena hasil dari aktivitas manajemen akan menghasilkan keuntungan untuk manajemen itu sendiri (Rowland, dkk, 2015). Selain itu manajer memiliki wewenang yang sangat besar dalam mengatur untuk melakukan pilihan-pilihan metode akuntansi, dan juga kebijakan tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan (Achmad Badjuri, 2011).

Likuiditas merupakan sebuah indikator mengenai kemampuan entitas dalam membayar semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang tersedia dalam perusahaan (Ahmad & Antonius, 2012). Likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap CSR. Perusahaan yang memiliki likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal kepada perusahaan lain, bahwa mereka lebih baik dibandingkan perusahaan lain dengan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial (Ahmad & Antonius, 2012). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara dana yang disediakan pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari kreditor perusahaan (Fitri & Andi, 2016). Perusahaan yang memiliki rasio *Leverage* lebih tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang lebih rendah. Semakin Luas Pengungkapan maka semakin tinggi informasi yang didapat oleh investor (Ahmad & Antonius, 2012). Profitabilitas merupakan faktor yang dapat memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan juga mengungkapkan kepada pemegang saham program tanggung jawab sosial secara lebih luas (Achmad Badjuri, 2011).

Penelitian yang terkait ukuran perusahaan, *Good Corporate Governance*, faktor fundamental dan juga pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada perusahaan telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Maka dari itu hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan hal yang penting dan juga membutuhkan perhatian yang besar.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri & Andi (2016) yang membahas mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi menunjukkan hasil bahwa terbukti berpengaruh terhadap tingkat keluasan pengungkapan CSR adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan likuiditas. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Wijaya (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI menunjukkan hasil bahwa hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR dan selebihnya tidak berpengaruh.

Berbeda dengan penelitian Dita Rohmah (2015) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di dalam laporan *Sustainability* menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dan pada penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badjuri (2011) mengenai faktor-faktor fundamental, mekanisme *Corporate Governance*, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan manufaktur dan sumber daya alam di Indonesia menunjukkan hasil bahwa hanya variabel profitabilitas, *size* dan dewan komisaris independen yang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada level signifikansi 5%, sedangkan variabel lain tidak berpengaruh pada signifikansi 5%.

Penelitian ini akan didasari oleh dua teori. Yaitu teori pertama yang digunakan adalah teori *Legitimacy*, pengaruh dari seluruh pemangku kepentingan

atas pencapaian tujuan perusahaan, maka pemangku kepentingan memiliki posisi tawar dihadapan perusahaan. Posisi ini sangat menentukan keberadaan (legitimasi) perusahaan. Karena legitimasi perusahaan berbanding lurus dengan pemenuhan tanggung jawab perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Dede Abdul, 2016). Teori kedua yang digunakan adalah Teori *Agency*, berdasarkan teori ini perusahaan akan menghadapi berbagai macam biaya seperti biaya kontrak, dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah. Sebagai wujud pertanggung jawaban, manajer yang bertindak sebagai agen akan berusaha untuk memenuhi keinginan dari pihak prinsipal, dalam hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan (Raisa Pratiwi, 2012).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka beberapa pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?

5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
6. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?
7. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility*
2. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility*
3. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor ukuran dewan komisaris terhadap *Corporate Social Responsibility*
4. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor kepemilikan manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility*
5. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor likuiditas terhadap *Corporate Social Responsibility*
6. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility*
7. Untuk mengetahui pengaruh dari faktor profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan pemahaman kepada perusahaan agar dapat lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* karena hal ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi pihak investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan.

##### 2. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pihak investor mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility* untuk pengambilan keputusan dan memberikan pertimbangan saat akan menanamkan modal atau saat akan berinvestasi pada suatu perusahaan.

##### 3. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada penulis tentang pentingnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* karena hal ini dapat memperluas pengetahuan penulis dan juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis jika ingin menanamkan modal pada perusahaan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Adanya sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran yang berisi variabel yang digunakan berdasarkan landasan teori, dan hipotesis penelitian

**BAB III           METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan tentang prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dalam penelitian. Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data dan yang terakhir adalah teknik analisis data.

**BAB IV           GAMBARAN SUBYEK DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini berisi tentang gambaran Subyek Penelitian dan Analisis Data yang memuat analisis dari hasil penelitian

**BAB V            PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan Akhir, Keterbatasan Penelitian dan Saran.